**MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN USAHA PETERNAKAN ITIK DI KABUPATEN SIDRAP**

**Lukman, Abdul Jabbar A.**

Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

*E-mail:* *lukmansirap75@gmail.com*

**ABSTRAK**

Penelitian ini menggunakan Metode deskriptif kualitatif. data yang dikumpulkan melalui hasil observasi, wawancara dan dokumentasi diuji keabsahan melalui triangulasi data sehingga menghasilkan kesimpulan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan berbagai phenomena dalam proses kolaborasi terhadap pengembangan usaha ternak itik di Desa Kanie. Kondisi, peternakan di desa kanie yang masih bersipat tradisional, belum ada kebijakan yang mengatur tentang wilayah kekuasaan para peternak. Sedangkan berdasarkan Desain Kelembagaan, pemerintah desa Bersama dengan masyarakat serta pelibatan pihak luar (swasta) belum terjadi, pemerintah desa belum melakukan langkah kolaboratif guna memotivasi pengembangan usaha ternak itik di desa Kanie.

**Keyword:** *Collaborative Governance; pengembangan usaha*

**LATAR BELAKANG MASALAH**

Berternak itik memiliki kelebihan jika dibandingkan dengan ternak unggas yang lainnya, dimana tubuh itik lebih tahan terhadap penyakit sehingga pemeliharaannya mudah dan kurang mengandung resiko, serta daging itik rasanya lebih gurih dibanding daging ayam. Selain itu juga, itik memiliki efisiensi dalam mengubah pakan menjadi daging yang baik (Akhadiarto,2002).

Peternakan itik saat ini masih didominasi oleh peternak dengan sistem pemeliharaan yang masih tradisional di mana itik digembalakan di sawah atau di tempat-tempat yang banyak airnya. Namun pada kondisi sekarang banyak terjadi perubahan pola pemeliharaan yaitu dengan pola intensif yang sepenuhnya terkurung dalam kandang dengan pemberian pakan yang tidak terbatas. Pergeseran pola/sistem budidaya itik ini disebabkan oleh berkurangnya tempat penggembalaan antara lain karena makin intensifnya penanaman padi disawah, konversi atau alih fungsi lahan persawahan menjadi daerah pemukiman dan industri.

Model peternakan itik kebanyakan menggunakan cara tradisional yang skala pemeliharaannya kecil dan model pemberian pakan yang mengandalkan pakan alami. Saat ini berkembang bisnis ternak itik untuk pemenuhan kebutuhan daging dan untuk kebutuhan telur yang sudah ada sebelumnya. Seiring dengan semakin tumbuh warung makan serba itik, kebutuhan itik pedaging tidak kalah banyak dengan itik petelur. Selain itu pemenuhan daging itik saat ini sudah tidak mencukupi lagi. Prospek dari usaha pemeliharaan itik petelurpun cukup baik mengingat konsumsi telur dari tahun ke tahun terus meningkat, pemeliharaannya sudah mengarah pada semi intensif maupun kearah intensif (Simamora,2001).

Usaha peternakan itik telah banyak digeluti oleh masyarakat dibeberapa daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Ternak itik sangat cocok untuk dikembangkan di Kabupaten Sidrap, hal ini karena Kabupaten Sidrap merupakan daerah yang sebahagian besar luas wilayahnya terdiri dari areal persawahan sehingga sangat cocok untuk mengembangkan ternak itik. Dukungan dengan banyaknya ketersediaan pakan dari sektor pertanian sebagai daerah lumbung padi juga mendukung untuk pengembangan ternak itik.

Sebahagian besar masyarakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah peternak itik akan tetapi, usaha peternakan itik belum mengalami perkembangan usaha peternakan yang besar. Hal ini disebabkan karena usaha peternakan masih bersifat tradisional yang mana peternak harus berpindah tempat dari satu lokasi ke lokasi yang lain.Pemeliharaan itik secara tradisional makin mengandung resiko besar. Seperti yang terjadi di Desa Kanie Kecamatan Maritengngae, dimana terjadi konflik antara peternak itik dengan petani yang berujung pada pembakaran rumah-rumah petani. selain itu sering juga itik mati mendadak di area persawahan hal ini sering dicurigai karena adanya kesalahfahaman antara petani dan peternak. Ini adalah sebuah kondisi yang sangat mengkhawatirkan jika dibiarkan tanpa ada regulasi yang mengatur hal tersebut.Oleh sebab itu proses pengambilan keputusan, komitmen bersama dan deliberatif menjadi point penting bagi seluruh *stakeholder* yang terlibat dalam inovasi kebijakan strategis *collaborative governance*. Selain itu Inovasi kebijakan publik menjadi keharusan ketika kebijakan manual yang hanya berfungsi sekedar menggugurkan kewajiban pemerintah melahirkan berbagai kekecewaan dan kecemasan ditengah-tengah publik,khususnya yang menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak. (Dede Mariana, 2010 dalam Sururi,2017).

*Collaborative governance* adalah jenis “*governance*” yang mendorong upaya bersama dari pemangku kepentingan dan non-state untuk bekerja sama dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan kolektif dan implementasi. (Huxham dan Vangen, 2000)

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas , maka penulis merasa perlu melakukan penelitian yang berjudul “Model Collaborative *Governance* dalam Pengembangan Usaha Peternakan Itik di Desa KanieKabupaten Sidenreng Rappang”

Untuk Menganalisis proses kolaborasi dalam pengembangan usaha peternakan di Kabupaten Sidenreng RappangUntuk menganalisis desain kelembagaan pengembangan usaha peternakan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk menganalisis peran kepemimpinan dalam pengembangan usaha peternakan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini dari aspek teoritis mengoptimalkan penjelasan yang berkembang selama ini tentang *collaborativ egovernance* dalam konteks pengembangan usaha peternakan itik yang akan lebih berorientasi consensus dalam pengambilan keputusan.Temuan yang ditargetkan dalam penelitian ini yakni penemuan model kolaborasi yang tepat dalam pengembangan Usaha, Model ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam pengelolaan peternakan itik di Kabupaten Sidrap.

**Konsep Collaborative *Governance***

Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi, bentuk pemerintahan baru telahmuncul untuk menggantikan mode manajerial pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. bentuk pemerintahan tersebut dapat berupa kolaborasi dalam tata kelola pemerintahan atau disebut *collaborative governance*. Collaborative *governance*, pada dasarnya untuk menyatukan pemangku kepentingan umum dalam hal ini pemerintah dan swasta dalam forum kolektif dengan lembaga publik untuk terlibat dalam pengambilan keputusan yang berorientasi pada tercapainya tujuan bersama.

Kolaborasi diartikan sebagai bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen terkait baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. (Haryono, N.,2012:48)

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa berbagai bentuk kerja sama, interaksi di pemerintahan, maupun resolusi konflik di berbagai aktor yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung akan menerima dampak dari penyelenggaraan pemerintahan.

Selain itu, beberapa ahli seperti Innes dan Booher, Healey, serta Gunton dan Day mengemukakan perencanaan kolaboratif sudah berhasil dilaksanakan di beberapa negara misalnya untuk mengatasi kasus-kasus lingkungan, keamanan, pengelolaan air yang melibatkan banyak pemangku kepentingan, dan lintas daerah administratif. (Sufianty, E.,2014:78)

Dalam teori dan praktek tentang collaborative *governance*, Emerson et.al. (2011:2) yang menyatakan *collaborative governance* sebagai: *“the processes and structures of public policy decision making and management that engae people constructively across the* Jurnal Wacana Publik Vol 1 No 2,2017 hlm 48 - 62 *boundaries of public agencies, levels of government, and/or the public, private and civic spheres in order to carry out a public purpose that could not otherwise be accomplished”.* (proses dan sturktur pengambilan keputusan kebijakanpublik dan manajemen yang melibatkan orang-orang secara konstruktif pada batas-batas lembaga-lembaga publik, tingkat pemerintahan, dan masyarakat, swasta dan sipil untuk melaksanakan kepentingan umum yang tidak bisa dicapai jika dilakukan satu pihak saja).

Konsep *collaborative governance* sendiri mencakup keterlibatan institusi-institusi mana saja yang tengah memulai usaha kerja sama, dan apa inisiatif dari masing-masing institusi (*stakeholders*) dalam menentukan/mendefinisikan tujuan, menilai hasil, menyebabkan perubahan, dan sebagainya.

Dalam hal ini siapa yang memulai melakukan inisiatif bisa dilihat melalui tiga aspek. *Pertama*, inisiatif pasti bermula dari pemain/pelaku yang memiliki tuntutan jelas untuk mencerminkan kepentingan publik yang lebih besar. *Kedua*, masing-masing *stakeholders*atau institusi yang berkolaborasi harus memiliki peran dalam menentukan tujuan-tujuan kolaborasi. *Ketiga*, hubungan diantara institusi-institusi yang terlibat harus bersifat strategis, artinya bahwa setiap institusi dalam melakukan tindakan selalu bisa dilihat secara transparan dan yang lainnya memberikan respon terhadap transparasi tersebut (Donahue dalam Sudarmo, 2011). Kolaborasi diartikan sebagai bentuk kerjasama, interaksi, kompromi beberapa elemen terkait baik individu, lembaga atau pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang menerima akibat dan manfaat. (Haryono, N., 2012:48)

Dari pendapat para ahli diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa collaborative *governance* merupakan bentuk kerjasama dan Interaksi antar pemerintahdengan Masyarakat dalam komitmen pemberdayaan sehingga mereka saling bergantung satu sama lain dalam mengatasi masalah-masalah yang kompleks melalui pengambilan keputusan kolektif guna mencapai kesejahteraan bersama.

Berbagai penelitian tentang *collaborative governance* sudah banyak dilakukan, di antaranya dilakukan oleh Jung, Mazmanian dan Tang (2009) yang dilakukan di dua negara mengenai kerjasama antara Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam negoisasi perumusan kebijakan dan pemberian layanan serta menunjukkan bagaimana sejumlah faktor terkait erat dengan dinamika dan kinerja pengaturan pengaturan *collaborative governance* di kedua negara yaitu pelibatan aktor dari berbagai organisasi, konflik distribusi dan pentingnya perencanaan kebijakan.

Kemudian penelitian Tresiana dan Duadji (2017) tentang Kolaboratif Pengelolaan Pariwisata Teluk Kiluan yang menganalisis bagaimana prasyarat yang dimiliki dan diperlukan untuk penciptaan proses kolaboratif dalam pengelolaan pariwisata Teluk Kiluan sehingga proses kolaboratif tidak menghasilkan demokrasi semu tetapi bermanfaat bagi masyarakat, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat persyaratan yang belum optimal dalam pengelolaan pariwisata Teluk Kiluan dan membutuhkan perubahan dalam strategi kebijakan melalui dukungan pemerintah, partisipasi masyarakat, manfaat langsung, penggunaan sumber daya lokal, penguatan kelembagaan lokal dan sinergi antar tingkat dan daerah dan menyimpulkan bahwa untuk dapat memenuhi prasyarat masyarakat kolaboratif dalam perencanaan pengelolaan pariwisata, maka perlu dikembangkan model pengelolaan pariwisata berbasis komunitas masyarakat.

Selanjutnya penelitian Newman, Barnes, Sullivan dan Knops (2004) tentang pentingnya partisipasi publik dalam proses *Collaborative Governance*, hasilnya adalah terdapat kendala dalam proses inisiatif kebijakan pemerintah dan struktur politik. Selanjutnya penelitian tentang faktor budaya yang memengarhui pelaksanaan *Collaborative Governance* di Desa Budaya Brosot, yaitu: Hubungan Kekerabatan, Arisan, Jam Karet, Musyawarah Mufakat, Nggih ra Kepanggih, Ngaruhke, Gotong Royong dan Swadaya, Mokogi, Ngombyongi, dan Mosobodoa, Paternalistik dan orangnya sekitar itu itu saja dilakukan oleh Sambodo dan Pribadi (2016). Dan beberapa penelitian *Collaborative Governance* lain lain yang dilakukan Kurniasih, Setyoko dan Imron (2017), dan Mutiarawati dan Sudarmo (2017)

Menurut Ansell and Gash (2007:545) *Collaborative governance is therefore a type of governance in which public and private actors work collectively in distinctive ways, using particular processes, to establish laws and rules for provision of public goods* (*collaborative governance* merupakan salah satu tipe *governance* dimana aktor publik dan privat bekerja secara bersama dengan cara khusus, menggunakan proses tertentu, untuk menetapkan hokum dan aturan untuk menentukan publik yang baik).Definisi *Collaborative gevernance* menurut Ansell and Gash (2007: 544) menyatakan: *A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, concensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets.* (*Collaborative governance* adalah serangkaian pengaturan dimana satu atau lebih lembaga publik yang melibatkan secara langsung *stakeholders non state* didalam proses pembuatan kebijakan yang bersifat formal, berorientasi consensus dan deliberative yang bertujuan untuk membuat atau mengimplementasikan kebijakan public atau mengatur program public atau asset).

Moodel *collaborative governance* berdasarkan empat variabel dikemukakan oleh Ansel dan Gash (2007) yaitu sebagai berikut: *conditions, institutional design, leadership, and collaborative process.* Kemudian terdapat tiga komponen penting dalam mendorong desain kelembagaan dan kepemimpinan yaitu; *time, task and target.* (Doberstein, 2016)

Merujuk dari model collaborative sebagaimana telah dikemukakan oleh Ansel dan gash (2007) maka oleh Bappenas untuk menyelesaikan kebutuhan akan investasi infrastruktur di indonesia. Pemerintah Indonesia menawarkan skema kemitraan publik-swasta dalam mengembangkan projek infrastruktur“ to resolve the need for inprastruktur investment in indonesia. the government of Indonesia is offering public-private partnership seceme in develoving infrastructure projek”.

Lebih lanjut dijelaskan Lebih lanjut dijelakan Pada dasarnya ada tiga tahap untuk PPP: perencanaan (identifikasi proyek dan studi pendahuluan), persiapan (garis besar kasus bisnis dan kasus bisnis akhir), transaksi (persiapan tender, pra-kualifikasi, permintaan proposal, penghargaan penawaran, penandatanganan perjanjian PPP, dan penutupan finansial)

“(The are basically three stages for PPP scheme: planning (project identification and preliminary study), preparation (outline bussines case and final business case), transaction (tender preparation, pre-qualification , request for proposal, bid award,PPP agreement signing, and financial close)”.

Dari berbagai penelitian tersebut, diketahui bahwa dalam proses *Collaborative Governance* diperlukan reformasi dengan mensinergikan berbagai perspektif pemangku kepentingan,lebih dekat dengan masyarakat, dan memperluas kerjasama dengan pihak lain untuk memenuhi kebutuhan sumber daya, dan perekrutan SDM. Sedangkan penelitian ini akan melakukan identifikasi isu-isu dan menganalisis bagaimana pengembangan model inovatif kebijakan *collaborative governance* dalam proses pengembangan usaha peternakan itik di desa Kanie Kabupaten Sidrap.

**Prinsip Pengembangan Kelembagaan**

Dalam melakukan pengembangan kelembagaan kelompok hendaknya didasarkan kepada tiga prinsip pendekatan sebagai berikut

1. Enabling

Membantu masyarakat desa agar mampu mengenal potensi dan kemampuan yang mereka miliki, mampu merumuskan secara baik masalah-masalah yang mereka hadapi, sekaligus mendorong mereka agar mampu merumuskan agenda-agenda penting, dan melaksanakannya untuk mengembangkan potensi untuk menanggulangi permasalahan yang ada.

1. Empowering

Memperkuat daya yang dimiliki oleh masyarakat desa, dengan berbagai masukan (input) maupun membuka akses menuju peluang. Penguatan disini meliputi aspek penguatan modal mnusia, modal sumberdaya alam, modal financial, modal fisik, mupun modal sosial yang telah mereka miliki.

1. Protecting

Mendorong terwujudnya tatanan struktural, yang mampu melindungi dan mencegah terjadinya praktek dominasi kekuatan kelembagaan yang kuat terhadap yang lemah, sehingga terbuka kesempatan untuk bersinergi dan saling mengembangkan diri.

Kelembagaan lokal yang kuat diharapkan mampu mngelola kegiatan secara lebih efisien, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan program-program terkait. Dalam rangka pelaksanaan pengembangan usaha peternakan, maka penataan kelembagaan lokal diharapkan mampu membuktikan kesiapan diri berintegrasi dengan kelembagaan formal di desa, seperti dengan Pemerintahan Desa, BPD, LPMD termasuk juga diharapkan mampu mendorong funsi dan peran kelembagaan masyarakat ternak lainnya.

**Konsep Peternakan Itik**

Peternakan itik saat ini masih didominasi oleh peternak dengan sistem pemeliharaan yang masih tradisional di mana itik digembalakan di sawah atau di tempat-tempat yang banyak airnya. Namun pada kondisi sekarang banyak terjadi perubahan pola pemeliharaan yaitu dengan pola intensif yang sepenuhnya terkurung dalam kandang dengan pemberian pakan yang tidak terbatas (*adlibitum*). Pergeseran pola/sistem budidaya itik ini disebabkan oleh berkurangnya tempat penggembalaan antara lain karena makin intensifnya penanaman padi di sawah, konversi atau alih fungsi lahan persawahan menjadi daerah pemukiman dan industri. Selain itu juga karena meningkatnya kesadaran peternak untuk mencegah dan menularnya penyakit unggas seperti *Avian Influenza*. Pergeseran ini menunjukkan bahwa usaha peternakan itik bukan hanya sekedar sambilan akan tetapi sudah memiliki orientasi bisnis yang diarahkan dalam suatu kawasan, baik sebagai cabang usaha maupun sebagai usaha pokok, karena mengusahakan budidaya itik cukup menguntungkan.

Usaha peternakan itik memiliki prospek usaha yang cukup potensial untuk dikembangkan maupun untuk dipasarkan, baik usaha pokok maupun sebagai usaha sampingan, sehingga sangat membantu dalam meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Usaha peternakan itik telah lama dikenal masyarakat. Model peternakan itik kebanyakan menggunakan cara tradisional yang skala pemeliharaannya kecil dan model pemberian pakan yang mengandalkan pakan alami. Saat ini berkembang bisnis ternak itik untuk pemenuhan kebutuhan daging dan untuk kebutuhan telur yang sudah ada sebelumnya. Seiring dengan semakin tumbuh warung makan serba itik, kebutuhan itik pedaging tidak kalah banyak dengan itik petelur. Selain itu pemenuhan daging itik dari itik afkir saat ini sudah tidak mencukupi lagi. Prospek dari usaha pemeliharaan itik petelurpun cukup baik mengingat konsumsi telur dari tahun ke tahun terus meningkat, pemeliharaannya sudah mengarah pada semi intensif maupun kearah intensif (Simamora, 2011).

**Gambar 1**

**Fishbone**

Pemerintah desa sulit mengendalikan konflik

Banyaknya konflik antara petani dan peternak itik

**Ancaman**

**Peluang**

**Rasa nyaman dan aman bagi petani dan peternak itik**

**Kekuatan**

**Kelemahan**

Kurangnya Partisipasi

Peternak itik merasa menguasai lahan persawahan

Kebijakan Secara Tertulis Dari Pemerintah

Penerapan Model Kolaborative Governance

Penjelasan singkat tentang teknik analisis data dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:Reduksi data, Verifikasi data, Melakukan *triangulasi*, *Member Check*, Penarikan kesimpulan data.

1. **Kawasan Pertanian**

Kawasan pertanian merupakan fungsi peruntukan yang paling dominan yang ada di Desa Kanie, padi merupakan komoditas unggulan pertama tanaman pangan lahan basah. Komoditi tanaman pangan lahan kering hasil pertanian dan perkebunan antara lain palawija dan buah-

buahan. Komoditas untuk palawija adalah kacang tanah, cabe, ubi jalar dan jambu mente, pisang, jagung untuk buah- buahan.

Gambar 2

Kondisi Pertanian dan peternakan



1. **Kondisi Perekonomian**

Tingkat pendapatan masyarakat di Desa Kanie dapat diklasifikasikan dalam 2 tingkatan yakni pendapatan diatas Rp 4.500.000 perbulannya atau kategori tinggi, pendapatan Rp 3.000.000 – Rp 4.500.000 perbulan (kategori sedang) dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan pendapatan berkisar antara Rp 500.000 – Rp 1.000.000. sebagian yang menempati kawasan kumuh itulah yang tergolong di dalam MBR. Rendahnya tingkatan pendidikan juga mempengaruhi kondisi ekonomi di dalam kawasan prioritas tersebut (Kumuh). Secara umum mata pencaharian utama masyarakat di Desa Kanie adalah Pertanian, Perkebunan, Kehutanan dan Peternakan dll yaitu sebanyak 371 KK dari 599 KK yang ada di Desa Kanie. (hasil pendataan Baseline.

**Identifikasi Isu Dan Strategi Kolaborative Governance Dalam Pengembangan Usaha Ternak Itik di Desa Kanie**

1. **Kondisi**
2. Dimensi Structural Birokrasi

Isu yang merupakan aspek terpenting dalam kolaborasi governance antar pemerintah desa adalah dimensi struktur birokrasi antar pemerintah desa dalam hal ini colaborasi governance dalam pengembangan usaha peternakan itik di desa Kanie mengsyaratkan staf desa bersama tokoh masyarakat mempunyai kesamaan pemahaman tentang bagaimana merumuskan kebijakan dan mengimplementasikannya. Prinsip kerjasama dalam pengembangan usaha peternakan itik dengan beragamnya keterlibatan stakeholders menjadi tantangan sekaligus potensi dalam mengatasi permasalahan.

Sejalan dengan itu agar terdapat relasi structural birokrasi organisasi sector publik di pemerintahan desa Kanie dapat menjadi pilihan dalam mengatasi berbagai persoalan peternakan itik dilapangan dalam hal ini pemerintah desa harus bersifat enabling lingkage yang artinya pemerintah desa melibatkan lembaga pemerintahan di tingkat desa seperti badan perwakilan desa (BPD) dengan penyediaan wewenang untuk bekerjasama mencapai sumberdaya yang esensi. disamping itu hubungan lembaga dengan orang atau kelompok peternak itik yang tidak terkumpul dalam suatu organisasi. sebagaimana yang tertuang dalam kutipan wawancara berikut ini yang menjelaskan tentang faktor yang menghambat mekanisme tata peternakan itik di desa Kanie sebagai berikut:

“Proses peternakan itik di desa Kanie masih mengalami kesulitan untuk kita atur karena hampir semua peternak itik lebih memilih model tradisional dalam beternak”(Kades Kanie, S, 05 /06/2019)

Dari Hasil wawancara tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat kendala dalam proses pengembangan usaha ternak itik di desa Kanie yang disebabkan karena pola pikir masyarakat yang bersifat tradisional. berdasarkan hal tersebut dapat dianalisis bahwa terdapat indikasi belum tercipatanya relasi antara birokrasi pemerintahan desa Kanie tentang pola pengembagan peternakan itik yang modern berdasarkan penetapan target dan tujuan yang mesti diatur dalam kesepakatan bersama sehingga mengakibatkan terjadinya proses peternakan itik yang berpindah-pindah.

1. Sosialisasi pengembangan ternak itik secara modern

Isu kedua yang menjadi fokus utama dalam menjadi gagasan konseptual terkait sosialisasi pengembangan itik secara modern. Kolaborasi Pemerintahan melalui upaya pendekatan partisipatif masyarakat yang sudah dilakukan tidak hanya pada awal gagasan beternak itik secara modern melainkan hal tersebut harus dilakukan secara kontinyu dan konsisten, hal ini bertujuan agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap kebijakan pengembangan ternak itik.

Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan fakta bahwa masyarakat masih mempertanyakan bagaimana kelanjutan pengembangan usaha ternak itik secaramodern setelah diseminarkan melalui seminar kewirausahaan yang dicanangkan oleh pemerintah Desa Kanie. Oleh sebab itu sosialisasi tidak hanya bersifat parsial akan tetapi harus dilakukan secara kontinyu agar masyarakat memahami tujuan dari perkembangan program yang secara langsung akan melibatkan masyarakat ternak itik pada khususnya di desa Kanie Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap.Dalam wawancara tersebut, dikemukakan: “kami mewakili masyarakat desa Kanie khususnya peternak itik masih menunggu proses kelanjutan seminar. BPD kan sudah seminarkan tanggal 20 Juni 2019 kemarin, sekarang masih belum ada sosialisasi dan rencana pengadaan bibit unggul yang mau dikirim dari Kalimantan.” (Wawancara dengan toko masyarakat, H.A. 20/07/2019)

1. Relokasi ternak itik di desa Kanie

Hal yang paling penting juga untuk dibahas yang menjadi permasalahan dalam pengembangan usaha peternakan itik di desa Kanie adalah relokasi peternak itik. untuk kondisi saat ini para peternak belum bisa direlokasi disebabkan Karen belum memadainya sarana penunjang utamanya pakan ternak dan air serta bibit unggul. selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa peternak itik yang tergabung dalam kelompok ternak itik al-haq kampung Maluku desa Kanie kecamatan maritengngae kabupaten sidrap sepenuhnya belum meyetujui tawaran pemerintah desa dalam beternak itik dengan pola modern. penyebabnya karena para peternak masih bingung mendapatkan bibit unggul dari mana.

Mendorong masyarakat untuk melakukan pola peternakan secara modern menjadi prioritas isu yang harus dilakukan oleh pemerintah desa Kanie. termasuk dalam hal ini melakukan mobilisasi pengadaan bibit unggul melalui kerjasama dengan balai pelihari Kalimantan. upaya kerjasama dengan melibatkan balai pelihari Kalimantan menjadi prinsip utama sebagai bagian dari tata kelola collaborative governance sehingga dapat mendorong keberhasilan peternak itik. dalam hasil wawancara dengan salah satu peternak itik di kampung Maluku desa Kanie, bapak Larateng yang juga merupakan anggota kelompok ternak al-haq menjelaskan sebagai berikut:

“Masyarakat belum bisa beternak itik seperti yang diterangkan pak Lade’, hampir semua peternak itik menolak karena caranya yang belum dipahami. sampai saat ini juga kami masih bingung bagaimana caranya mendapatkan bibit unggulnya”. (L, 23/07/2019)

Berikut adalah hasil wawancara dengan kepala dusun II Desa Kanie Kecamatan Marintengngae Kabupaten Sidrap:

“Sekarang kami dari pemerintah Desa sedang memikirkan bagaimana caranya dapat menjaling kerjasama dengan masyarakat dan juga sedang mencari tahu bagaimana caranya bisa mendapatkan bibit itik yang unggul”. (Kepala Dusun II desa Kanie, H.B. 30/07/2019)

Pengembangan model dan tahap inovasi kebijakan collaborative governance pengembangan usaha ternak itik di desa Kanie

Guna mendorong tumbuhnya inovasi kebijakan pengembangan ternak itik di desa Kanie, maka salah satu prasyarat yang harus terpenuhi adalah mendorong kreatifitas pemerintah desa Kanie dalam menciptakan daya perubahan dan gagasan baru dalam berinovasi. dengan demikian nampak jelas bahwa inovasi kebijakan merupakan konsep atau proses yang bersifat kontinyu bagi pemerintah desa Kanie.

Selain itu, Kondisi peternakan itik didesa Kanie Kecamatan Marintengngae Kabupaten Sidrap masih sangat sulit dikembangkan disebabkan kondisi sumber daya manusia dalam beternak itik masih sangat tradisional. Pengembangan itik dengan cara tradisional dapat dibuktikan dengan pola peternakan yang menggunakan sistem berpindah-pindah dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya. sistem perpindahan tersebut mengikuti musim hingga terkesan tidak ada peternak yang menetap disuatu wilayah utamanya di desa Kanie. Akibatnya kondisi pasar hasil produksi ternak juga mengalami fluaktuasi harga produksi itik.

Mencegah terjadinya fluktuasi harga produksi itik berdasarkan musim maka pengembangan peternakan itik dapat dilakukan melalui sistem ternak yang berbasis modern. sistem ternak berbasis modern ini dapat dilakukan melalui model pendekatan ternak yang berbasis output. sejalan dengan pendekatan tersebut pendekatan ternak berbasis output dapat dilakukan selain dari pada kaum pria juga dapat dilakukan oleh ibu rumah tangga sebagai ladang pendapatan keluarga.

dalam hasil wawancara dengan salah kepala desa Kanie menjelaskan bahwa :

“ Sekarang ini peternak itik kita hanya dilakongi oleh laki-laki karena resiko beternak itik sangat besar” (S, 03/08/ 2019)

Sejalan dengan pernyataan tersebut juga didapatkan keterangan dari hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan salah satu peternak itik di dusun II Lapao desa Kanie Kecamatan Maritengngae atas nama Lausa. dari hasil wawancara dijelaskan bahwa:

*“Iya idi pakkiti’E marejjing kasi naijamato. iyaro idi pakkitiE kenro-kenroi engka ingngalang okkosikitu lao*”. (L, 03/08/2019)

artinya: “ Kami peternak itik melakoni usaha ternak itik ini sangat sulit namun tetap kami lakoni, dimana saja orang panen disitu lagi kita pergi”(L,03/08/2019).

1. **Institusional Design**

Pengembangan peternakan itik di desa Kanie masih membutuhkan Desain kelembagaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. pemerintah desa dalam mendesain suatu kebijakan kelembagaan setidaknya melibatkan berbagai stakeholders dalam perumusanya. Dengan melibatkan berbagai stake holders merupakan wujud partisipasi yang dikembangkan oleh pemerintah desa untuk meningkatkan pembangunan masyarakat diera industri saat ini.sebagaimana diketahui bersama bahwa diera insustri saat ini kita dituntut untuk selalu berkompetitip dalam berbagai bidang ilmu. untuk itu khususnya bidang perekonomian maka harapannya pemerintah desa Kanie dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan usahanya melalui desain kelembagaan. desain kelembagaan dimaksud adalah dimana pemerintah desa merupakan bagian dari stakeholders yang memiliki kewenangan untuk membuat berbagai peraturan yang dapat menciptakan rasa aman kepada masyarakat dalam menumbuhkan perekonomiannya.

Sejalan dengan itu, masyarakat yang masih melakukan model pengembangan usaha ternak itik dengan sistem tradisional diharapkan mampu mengubah pola peternakannya dengan model yang lebih produktif. salah satu model produktif yang dapat dikembangkan adalah dengan sistem peternakan dengan menggunakan sistem kandang. Sistem peternakan itik yang dikandangkan dapat dilakukan untuk mengurangi resiko peternak serta dapat meningkatkan produktivitas ternak. meskipun sistem ini dianggap mampu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat namun kelemahannya karena pemerintah desa belum mebuat regulasi tentang pola ternak sistem kandang di desa Kanie. sebagaimana hasil wawancara dengan dengan salah satu staf desa Kanie yaitu Aidil dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Sistem peternakan itik didesa Kanie ini memang belum ada sama sekali regulasinya pak, peternak itu bebas memelihara itik berapa dandimana saja mereka mau. Hanya saja saya lihat mereka juga berkelompok-kelompok”. (A, 05/08/2019)

Sejalan dengan keterangan yang didapatkan dari staf desa tersebut maka dilakukan juga wawancara dengan salah satu peternak itik di kampung Maluku desa Kanie yakni peternak atas nama Labeka. hasil wawancara sebagai berikut:

“*De’mitto gaga aturanna idi pakkitie okko kampotta, saba iyaro idi kasi kenro-kenrosi massangki taue okkosikitu lao, saba ko massangkisi taue okko pinrang kapan namarejjing sedding okko kampotta itelponsi anggotae makkada magatu, iya nakkadana anggotae laonomei laibawasi itike laookkoro”*

Artinya “ Kami peternak itik memang tidak memiliki aturan sebab kami hanya mengikuti musim panen diberbagai daerah, misalkan apabila kami merasa pakan itik sudah berkurang di tempat kami dan kebetulan di daerah pinrang orang sudah panen, maka kami menelpon dulu anggota kesana dan kalau mereka bilang kesinimi maka dengan segera akan berangkat kesana dengan itik kami”(Labeka, 05/08/2019)

Berdasarkan keterangan hasil wawancara bersama dengan beberapa orang diatas maka, dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa dalam hal desain kebijakan peternakan itik di desa Kanie kurang respon dengan kondisi masyarakat. terbukti dengan beberapa keterangan hasil wawancara yang mengatakan bahwa tidak ada aturan yang mengikat peternak sehingga rawang menyebabkan terjadinya perselisihan di desa Kanie sebab masyarakat yang menggeluti usaha ternak itik memiliki kebebasan dan kelompok masing.

1. **Leadership**

Leadership merupakan salah satu strategi untuk mewujudkan keamanan dan ketentraman di desa Kanie. pemerintah desa bersama dengan jajarannya sebaiknya menjalankan proses leadership dalam pengembangan usaha ternak itik di desa Kanie. oleh karenanya untuk mencapai tujuan pembangunan di desa maka pemerintah desa berkewajiban untuk mendukung kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakatnya. salah satu kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat desa Kanie adalah beternak itik. beternak itik membutuhkan dukungan dari stake holders atau dalam hal ini pemerintah desa. sangat disayangkan pemerintah desa Kanie yang seharusnya menjadi stakeholders yang dapat menjalankan proses leadership dalam beternak itik ternyata kurang responsive. hal tersebut dikemukakan oleh salah seorang tokoh masyarakat yang juga merupakan peternak itik di kampung Maluku yaitu H. Agus. hasil wawancara sebagai berikut:

“Anu kita disini pak, tidak natahu pak desa bagaimana caranya itu masyarakat bisa dikembangkan usahanya, coba seandainya maui bagi-bagikan anak itik kepada masyarakat biar dikandang saja begini” (H.A, 07/08/2019)

demikian pula hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu peternak di kampung lapao dusun II labempa sebagaimana hasil wawancaranya sebagai berikut:

“Tidak adami sekarang dibilang punggawa, sebab semua orang sudah merasami jago. kalau tidak cocok disini kita kedaerah lain. apalagi yang namanya bantuan susahmi kita dapat”. (YL. 10/08/2019)

berdasarkan keterangan hasil wawancara disimpulkan bahwa proses kolaborasi dari sisi kepemimpinan dalam menjalankan usaha ternak itik di desa Kanie masih sangat minim. dimana pemerintah desa diharapkan mampu memberi motivasi kepada para peternak namun hal tersebut tidak terjadi disisi lain para peternak juga sudah mulai merasa mengandalkan dirinya dengan tidak perlu mengharap bantuan dari pemerintah desa.

1. **Collaborative Proces**

Proses kolaborasi merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan perekonomian masyarakat saat ini. Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat khususnya para peternak itik di desa Kanie. maka, diharapakan usaha peternakan itik dapat dikembangkan dengan baik. Untuk mengembangkan usaha peternakan itik didesa Kanie maka pemerintah diharapkan selain mampu menyediakan sumberdaya berupa bibit unggul juga diharapkan mampu menemukan pangsa pasar untuk hasil produktifitas masyarakat.

 Di lain sisi masyarakat sebagai bagian dari proses yang mengembangkan dan melakoni usaha peternakan itik diharapkan mampu mengikuti berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan salah satu tokoh yang berhasil melakoni usaha peternakan itik dengan sistem kandang di Kabupaten Sidrap yaitu bapak Andis. beliau menyatakan sebagai berikut:

“Saya baru kurang lebih dua tahun menggeluti usaha ini pak, ternyata hasinya cukup memuaskan. dan ternyata hanya dalam waktu kurang lebih 4 bulan sudah ada yang bertelur.dari 300 ekor itik yang saya pelihara ini mampu menghasilkan telur sebanyak 250an bahkan biasa sampai 287 butir sehari Pak”. (A, 19/08/2019)

 Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa usaha ternak itik dengan pola dikandangkan merupakan suatu usaha yang dimana peternak dapat meraut hasil yang besar dengan resiko yang kecil. Demikian juga hasil wawancara yang dilakukan bersama dengan salah satu pedagang itik potong di dusun II Lapao yaitu masyarakat atas nama Lannae. hasil wawancaara mengemukakan sebagai berikut:

“ Saya itu setiap hari memotong itik sekitar 200 ekor karena banyak sekali pesanan. terkadang saya sampai ke Soppeng, Sengkang, Pinrang bahkan terkadang saya sampai ke Pekkabata cari itik pak”. (L, 20/08/2019)

berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat disimpulkan bahwa beternak itik dengan sistem kandang ini dikembangkan di desa Kanie. Selain dengan resiko yang kecil pangsa pasarnya pun juga sangat besar. oleh karenanya pemerintah sebagai stakeholders diharapkan dapat memberikan motivasi dan dukungan penuh kepada peternak itik agar dapat mewujudkan visinya yakni mewujudkan Kanie sabagai desa Mandiri yang berbasis agrobisnis modern.

 Mengadaptasi dari berbagai model collaborative governance, peneliti berusaha mengembangkan sebuah model inovasi kebijakan collaborative governance dalam pengembangan usaha ternak itik di desa Kanie kecamatan maritengngae kabupaten sidrap yang terdiri dari empat komponen penting yaitu *Pertama* merupakan kondisi awal yang terdiri dari kondisi eksisting Pemerintah desa Kanie, dasar pertimbangan Struktur birokrasi, Sosialisasi, Lokasi ternakdan ekonomi. *Kedua* adalah desain kelembagaan yang terdiri dari prosedur kelembagaan komitmen terhadap proses berupa kepercayaan dan persamaan persepsi dari masyarakat. *Ketiga* adalah kepemimpinan yang terdiri dari proses dan ketaatan hukum dan political will, *Keempat* adalah kondisi akhir yang terdiri dari tindak lanjut dan keberlanjutan dalam produktivitas.

**Pengembangan Model Colaborasi Governance Dalam Pengembangan Usaha Ternak Itik di Desa Kanie**

Salah satu prasyarat yang dapat mendorong tumbuhnya inovasi kebijakan adalah kreatifitas birokrasi dalam menciptakan daya perubahan dan gagasan baru (Sururi,2017). hal ini menunjukkan bahwa inovasi kebijakan adalah proses yang terdiri dari tindak lanjut dan berkelanjutan.

Mengadopsi dari berbagai teori tentang collaborasi governance, penulis berusaha untuk mengembangkan model inovasi kebijakan dalam pengembangan usaha peternakan itik di desa Kanie. yang terdiri dari empat komponen penting yaitu:

Gambar 3

**Pengembangan Model Colaborasi**

1. Pola ternak tradisional
2. Sosialisasi kebijakan kurang
3. Lokasi ternak tidak tetap
4. Budaya
5. Komitmen pemerintah
6. Persamaan persepsi
7. Ketaatan hukum
8. Political will

Tindak Lanjut Dan Berkelanjutan

Berdasarkan gambar diatas ditemukan beberapa elements kolaborasi:

1. Kondisi, peternakan di desa kanie yang masih bersipat tradisional dengan mengikuti musim sehingga para peternak condong berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain.

Kebijakan yang masih belum jelas membuat para peternak masih saling mengklaim daerah kekuasaan sehingga cendrung menimbulkan konflik antar peternak.

Budaya ternak oleh masyarakat yang masih bersifat tradisional dapat menyebabkan konflik antara petani selaku pemilik sawah dengan peternak.

1. Desain Kelembagaan

Komitmen pemerintah desa dalam hal pengembangan usaha ternak itik di desa kanie belum Nampak adanya. Hal tersbut dibuktikan dengan belum adanya usaha pemerintah desa untuk menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan pemberdayaan berupa pengembangan usaha ternak itik.

Disamping itu, tidak adanya kesamaan persepsi antara masyarakat dengan pihak pemerintah desa kanie menyebabkan budaya ternak oleh masyarakat masih bersifat tradisional.

1. Kepemimpinan

Kepala desa yang bertindak selaku Pemimpin tertinggi ditingkat desa sangat diharapkan untuk mampu melakukan kegiatan pemberdayaan kepada masyarakat dalam hal pengembangan usaha ternak itik di desa kanie hingga akhir penelitian ternyata belum mampu untuk memberikan motivasi ataupun dorongan kepada masyarakat untuk dapat beternak dengan sistem kandang secara modern.

Selain itu keinginan politik dalam usaha pengembangan ternak itik di Desa Kanie tidak mempengaruhi budaya ternak yang ada, namun dibutuhkan suatu pendekatan kekuasaan oleh kepala desa untuk mampu berkolaborasi dengan pihak lain dalam hal ini pihak swasta untuk dapat melakukan kerjasama dalam hal ketersediaan bibit unggul.

1. Proses Kolaborasi

Dalam proses kolaborasi yang terjadi antara pihak pemerintah desa kanie Bersama dengan masyarakat serta pihak swasta dalam usaha pengembangan itik didesa kanie belum terlaksana sehingga berbagai permasalan yang kompleks masih sering terjadi. Padahal diharapkan proses kolaborasi tersebut sangat dibutuhkan untuk dapat menciptakan kondisi peternakan itik yang kondusif dan dapat dikembangkan berdasarkan harapan visi dan misi desa kanie yang berorientasi agrobisnis yang mandiri.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agbodzakey.2011. Collaborative Governance of HIV Health Services Planning Councils in Broward and Palm Beach Countries of South Florida, Journal Springer Science Business Media.

Agranoff and Mic Guire. 2004. Collaborative Public Managemen : New Strategies for Local Mangement. Washington. Georgetown University Press.

Akhadiarto. 2002. Kualitas fisik daging itik pada berbagai umur pemotongan. Pusat Pengkajian dan Penerapan Teknologi Budidaya Pertanian. BPPT. Bogor.

Ansell, Chris, and Alison Gash. 2007.Collaborative Governance in Theory and Practice.*Journalof Public Administration Researchand Theory*.JPART18:543-571

Bappenas 2018. publik private partnership infrastruktur projects plan in Indonesia.

Emerson, Kirket.al.2011.An Integrative Framework for Collaborative

Emerson,K.,Nabatchi,T.,& Balogh,S.(2011).*An Integrative frame work for* Collaborative *Governance*, (June 2009)1–29 <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>

Fredericson, George H., 1997. The Spirit of Public Administration. Jossey-Bass. California.

Fredericson, George H., ans Kevin B. Smith. 2002. The Public Administration Theory Primer. USA. Westview Press

Goddars, Jodi. 2006. Third Sector in Partership Arrangements; Navigating New Water or Treading Water?” Adelia. Australia and New Zeland.

Governance.*Journal of Public Administration Research and Theory*. JPART22:1-29

Heikkila,Tanyaand AndreaK. Gerlak.2005.“The Formation of Large- scale Collaborative Resource Management Institutions:Clarifying the Rolesof Stakeholders,Science,and Institutions.”Policy Studies Journal33(4):583-612.

Huxham, Chris and Vangen Siv, 2006, Achieving collaborative advantage:understanding the challenge and makingit happen, Qemerald Group Publishing Limited, VOL.22NO.22006,pp.3-5,ISSN0258-0543Issue4,p543-571.

Jo Hatch Mary. 1997. Organization Theory Modern, Symbolic and Postmodern Perspective: Oxford. New York.

Keban, Y. T. (1999).*Hubungan antara pemerintahan daerahyang satu dengan pemerintah daerah yang lain.*

LAN dan BPKP. 2000. Akuntabilitas and Good Governance. LAN RI. Jakarta.

Moleong,Lexy J.2011.*Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Mutiarawati Tika, Sudarmo, (2017*Collaborative Governance dalam* Penanganan *Robdi Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan,* Jurnal Wacana Publik Vol 1 No2, 2017 hlm 48 –62

Raharja. 2015. Synergy in Watershed Mangement: Case Study on Citarum Watershed- Indonesia. International Journal of Humanities and Social Science Invention.

Sudarmo,2011,*Issu-Issu Administrasi Publik Dalam Perspektif* Governance*,* Surakarta: Smart Media.

Sugiyono.2009.*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Sugiyono. 2014. Memahami *Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Strategies for Local Mangement. Washington. Georgetown University Press.